

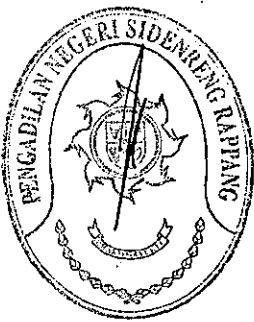
PUTUSAN

Nomor 405/PID.SUS/2018/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:



Nama lengkap : Hasna Tang Alias Hasna Binti Sennang;
Tempat lahir : Pujo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun /Jumat 01 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pujo Desa Bulu Cenrana
Kecamatan Pitu Riawan, Kab. Sidenreng
Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 405/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 405/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG dengan teman-temannya yaitu saksi ABDUL KADIR bin BEDDU dan saksi TAHIR bin LAONDING (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita dan sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa dihubungi OLLONG (belum tertangkap) melalui handphone lalu menyampaikan agar terdakwa mengumpulkan 10 (sepuluh) orang untuk bertemu dengan OLLONG di Rappang dalam rangka pertemuan terkait PILKADA Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mengajak saksi ABDUL KADIR dan saksi TAHIR (masing-masing dituntut secara terpisah) serta NURHAYATI, SINAR, ROSMA, ENNI, NURHALISA WATI, JUMA'ATI dan satu orang yang tidak diketahui namanya berangkat menuju Rappang untuk menemui OLLONG, sesampainya di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang, terdakwa, saksi ABDUL KADIR, saksi TAHIR, NURHAYATI, SINAR, ROSMA, ENNI, NURHALISA WATI, JUMA'ATI dan satu orang lagi masuk ke salah satu rumah, di rumah tersebut sudah menunggu OLLONG, kemudian OLLONG memberikan uang kepada terdakwa, saksi ABDUL KADIR, saksi TAHIR, NURHAYATI, SINAR, ROSMA, ENNI, NURHALISA WATI, JUMA'ATI dan satu orang lagi masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian masing-masing memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mencari 5 (lima) rumah untuk dibagikan sisanya sebesar Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing rumah / Kepala Keluarga memperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA tanggal 27 Juni 2018 dan dilampirkan bukti penyerahan uang berupa foto copy Kartu Keluarga yang dikumpulkan kepada terdakwa, setelah pertemuan tersebut lalu terdakwa, saksi ABDUL KADIR, saksi TAHIR, NURHAYATI, SINAR, ROSMA, ENNI, NURHALISA WATI, JUMA'ATI dan satu orang lagi pulang ke rumah masing-masing di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita, saksi ABDUL KADIR membagikan uang tersebut kepada tetangganya yang terletak di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kepada saksi MAHYUDDIN (dituntut secara terpisah), LAPONE dan JUHARIS masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh saksi MAHYUDDIN, LAPONE dan JUHARIS menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada saksi ABDUL KADIR, pada saat itu saksi ABDUL KADIR mengatakan kepada saksi MAHYUDDIN, LAPONE dan JUHARIS agar mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 2018, kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi TAHIR membagikan uang tersebut kepada tetangganya yang terletak di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu saksi HAMKA alias AMBO ANGKA (dituntut secara terpisah) dan SUGIMAN masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh saksi HAMKA dan SUGIMAN menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada saksi TAHIR, pada saat itu saksi TAHIR mengatakan kepada saksi HAMKA dan SUGIMAN agar mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

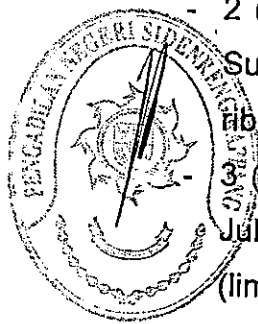
1. Menyatakan Terdakwa HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa HASNA TANG alias HASNA SENNANG tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama JUHARIS, LAPODING, MAHYUDDIN;
 - Uang tunai sebanyak 5 lembar pecahan Rp. 100.000,-;Digunakan dalam perkara An. ABDUL KADIR bin BEDDU.
2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama SUGIMAN dan HAMKA;
Uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
Digunakan dalam perkara An. TAHIR bin LAONDING.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan Nomor 228/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasna Tang Alias Hasna Binti Sennang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan

kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Sugiman dan Hamka, dan Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Tahir Bin Laonding;

- 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Juharis, Lapoding, Mahyuddin, dan Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Abdul Kadir Bin Beddu;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid /2018/PN. Sdr tanggal 24 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Juli 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

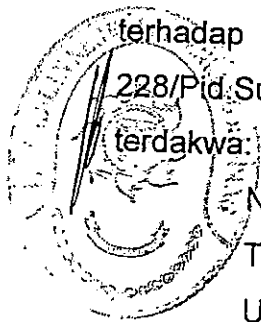
Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 Jo. 237 KUHP Jo. Pasal 148, 149 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 dalam perkara atas nama terdakwa:



Nama Lengkap	: HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG.
Tempat Lahir	: Pujo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
Umur / Tgl. Lahir	: 18 Tahun / 01 Oktober 1999.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun II Pujo Desa Bulu Cenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SMA (tidak tamat).
Dengan amar putusan	:

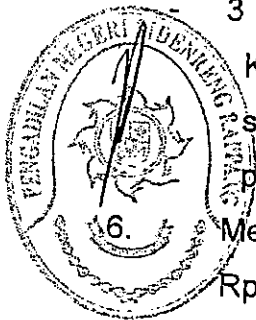
1. Menyatakan terdakwa HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa peraharian yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga HAMKA dan Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Tahir bin Laonding;

3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Juharis, Lapoding dan Mahyuddin serta Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Abdul Kadir bin Beddu.



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan : menerima.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan banding. Karena kami Pemohon Banding/Penuntut Umum sampai dibuatnya memori Banding ini belum menerima salinan Putusan lengkap dari Majelis Hakim namun hanya menerima petikan putusan sehingga Pemohon Banding/Penuntut Umum tidak bisa menguraikan pertimbangan-pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang secara terperinci, tetapi Pemohon Banding/Penuntut Umum akan menguraikan keberatan berdasarkan inti dari putusan Majelis Hakim yang kami tidak sependapat pada saat pembacaan putusan pada tanggal 23 Juli 2018.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut ialah sebagai berikut:

Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor, 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peneleapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam ancaman pidana penjara dari

pidana denda terhadap pasal tersebut berlaku ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun dalam putusan No. 228/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penjelasan BAB I huruf g menjelaskan bahwa pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hal tersebut sejalan seperti yang telah kami tuangkan di hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan kami yaitu "perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang bersih" karena sejatinya pemimpin dipilih berdasarkan hati nurani rakyat tanpa pengaruh apapun terlebih lagi pengaruh materi dalam hal ini "uang" sehingga dapat terwujud pemimpin seperti yang di harapkan dalam Negara Demokrasi.

Bahwa dalam ketentuan Pidana pasal yang dilanggar oleh terdakwa tersebut tidak menentukan batas-batas minimal jumlah materi baik itu yang memberi maupun yang menerima, maka tujuan dari Undang-undang ini bukan hanya karna jumlah nominal namun lebih kepada dampak dan bahaya yang ditimbulkan, oleh karena itu sudah tepat apabila terhadap pelaku politik uang dihukum dengan pidana yang berat dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus, bukan hanya sekedar menghukum maupun membuat jera pelaku namun juga sebagai sarana preventif dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 228/Pid.Sus/2010/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 dengan menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan Terdakwa HASNA TANG alias HASNA binti SEINNANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa HASNA TANG alias HASNA SENNANG tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama JUHARIS, LAPODING, MAHYUDDIN;
 - Uang tunai sebanyak 5 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
Digunakan dalam perkara An. ABDUL KADIR bin BEDDU.
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama SUGIMAN dan HAMKA;
 - Uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
Digunakan dalam perkara An. TAHIR bin LAONDING.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Juli 2018 Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN. Sdr, beserta semua bukti -buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang baik dan telah meresahkan masyarakat dalam hal terjadinya suap menyuap untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilihan calon Bupati Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Juli 2018 Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 228/Pid.sus/2018/PN. Sdr tanggal 23 Juli 2018 dapat diperbaiki ;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan 187A ayat (1) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 228/Pid.sus/2018/PN. Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Hasna Tang Alias Hasna Binti Sennang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Sugiman dan Hamka, dan Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Tahir Bin Laonding;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Juharis, Lapoding, Mahyuddin, dan Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Abdul Kadir Bin Beddu;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018**

oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim,
AHMAD SHALIHIN, SH.MH dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing
selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim
dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY. TIMANG, SH.,**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

AHMAD SHALIHIN, SH.MH

ttd

MAKKASAU, SH.MH

ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.

BALINAN / OTOCOPY SESUAI ASLINYA
An PANITERA PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG
PAMUD, PIDANA
ANTAR. SH
NIP. 19680915 199303 1 003